

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (28) disebutkan bahwa:

*“Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.”*



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 113 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
28. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.**
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

Dengan demikian Ringkasan RKA PPKD adalah Ringkasan RKA dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (BPKA) DIY

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA SKPD</b>
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.9.02.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET - PPKD

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.150.577.950.087</b>
4 1 01	Pajak Daerah	1.959.426.865.770
4 1 02	Retribusi Daerah	810.085.400
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	110.119.268.734
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	80.221.730.183
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.510.440.000.420</b>
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.509.604.094.000
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.576.500.000</b>
4 3 01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.668.594.450.507</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>108.684.955.572</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	81.665.669.896
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.019.285.676
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>878.392.000</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	632.392.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	46.000.000
<b>5 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>26.021.177.076</b>
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	26.021.177.076
<b>5 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.389.884.527.138</b>
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	805.675.843.238
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	584.208.683.900
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.525.469.051.786</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>4.143.125.398.721</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>554.000.000.000</b>
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	550.000.000.000
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>554.000.000.000</b>
<b>6 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>305.000.000.000</b>
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>305.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>249.000.000.000</b>

Provinsi DI Yogyakarta, Tanggal Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
---

